

**KANDUNGAN PRINSIP KONSERVATISME DALAM
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS IFRS
(INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD)**

Ahmad Juanda

Staf Pengajar Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Malang
juanda@umm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to reveal the content of the principle of conservatism contained in financial accounting standards (GAAP) results of the convergence of International Financial Reporting Standards (IFRS). The use of the principle of conservatism still remains controversial, but several studies actually provide justification of the importance of the application of these principles, especially in the face of environmental uncertainty. Justification of the importance of the principle of conservatism that was not in line with IFRS. Some results of the study stated that IFRS does not recognize the principle of conservatism. By his deep permasalahan in this research is to explain why the IFRS less acknowledge the prinspi conservatism?

The expected outcome of this research is a taxonomic arrangement conservatism principle and the justification of normative theories to standardize the accounting treatment. The analytical method used is content analysis, which analyzes the content of the information against a set of regulatory accounting standards. The aspects assessed were associated with bagaimana accounting standards for the accounting of companies in Indonesia, especially that go public.

The results showed that. Accounting conservatism still play a role in the implementation of IFRS. IASB Standards (IFRS) do not refer explicitly to the application of the principle of conservatism, because it is not in accordance with the IFRS conceptual framework. However, conservatism does not go away just because it does not "stressed" in the standard. With the uncertainty of the application of conservatism will remain in the financial statements.

Keywords: perinsip Conservatism, IFRS, Financial Accounting Standards

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan globalisasi menuntut adanya suatu standard akuntansi internasional yang dapat diterima dan dapat dipahami secara internasional. Oleh karena itu muncullah suatu standard internasional yaitu IFRS (International Financial Reporting Standard) yang kemudian dijadikan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan di berbagai negara.

Di Indonesia, melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan arah pengembangan **konvergensi IFRS**

terhadap PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Konvergensi tersebut meliputi : 1). PSAK yang sama dengan **IFRS** akan direvisi, atau akan diterbitkan PSAK yang baru; 2). PSAK yang tidak diatur dalam **IFRS** akan dihapus; 3) PSAK industri khusus akan dihapuskan; dan 4) PSAK turunan dari perundang-undangan pemerintah tetap dipertahankan.

Peta arah (roadmap) program konvergensi IFRS yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama tahap adosi (2008 - 2011) yang meliputi Adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap

PSAK yang berlaku. Kedua tahap persiapan akhir (2011) yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. Ketiga yaitu tahap implementasi (2012) yaitu penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (International Financial Reporting Standard) maka saat ini Indonesia telah memasuki tahap persiapan akhir (2011) setelah sebelumnya melalui tahap adopsi (2008 – 2010), setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS.

Dalam rangka menyongsong pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan yang sudah secara penuh menggunakan standar akuntansi internasional (Konvergensi IFRS) pada awal tahun 2012, bagi dunia usaha perlu untuk mengambil langkah-langkah dini misalnya memahami argumentasi rasional dan dampak konvergensi IFRS terhadap laporan keuangan dan bisnis. Hal ini sangat penting mengingat penerapan konvergensi IFRS sangat berpengaruh pada iklim dunia bisnis di Indonesia.

Dengan dibuatnya satu standar akuntansi yang sama dan digunakan oleh seluruh negara akan semakin mendorong investor untuk masuk dalam pasar modal seluruh dunia, hal ini dikarenakan mutu dari laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi, pengungkapan yang lebih luas, informasi keuangan yang relevan dan akurat serta dapat diperbandingkan dan satu lagi yang sangat penting adalah dapat berterima secara internasional dan mudah untuk dipahami.

Pengaruh Adopsi IFRS pada laporan keuangan perusahaan yaitu dengan mengadopsi IFRS, laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Tujuan konvergensi IFRS adalah agar laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi lagi dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kegiatan investasi secara global, memperkecil biaya modal (cost of capital) serta lebih

meningkatkan transparansi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Di sisi lain, program konvergensi IFRS tersebut akan berdampak pada perubahan prinsip dan metode pelaporan keuangan di Indonesia. Secara sistematis Rahmany (2009) mengemukakan beberapa dampak program konvergensi IFRS antara lain, 1) Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global; 2) Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar; 3) Disisi lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif; 4) Smoothing income menjadi semakin sulit dengan menggunakan balance sheet approach dan fair value; 5) Principle-based standards mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earning management); 6) Penggunaan off balance sheet semakin terbatas.

Secara khusus program konvergensi IFRS berdampak pada proses pengukuran dalam pelaporan keuangan. Misalnya, total aktiva dan nilai buku ekuitas akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi jika mengadopsi IFRS dan yang terakhir, dengan mengadopsi IFRS, manajemen laba akan semakin rendah, dan pengakuan kerugian atau laba tidak didasarkan pada asas konservatisme tapi lebih mengarah pada fair value untuk meningkatkan nilai relevansi (value relevance) agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Salah satu kajian yang menarik tentang dampak konvergensi IFRS adalah masalah penerapan prinsip konservatisme. Hellman (2007) menyatakan Konservatisme merupakan konsep akuntansi yang problematik. Para teoritis kurang menyukai ide tentang pelaporan aset terlalu rendah, utang terlalu tinggi, penundaan pengakuan revenue, dan penyegeraan pembiayaan.

Namun demikian, Konservatisme diakui sebagai salah satu prinsip yang paling berpengaruh dalam akuntansi konvensional. Kebutuhan akan Konservatisme seringkali dikaitkan dengan realibilitas pelaporan peristiwa masa lalu, yang berimplikasi pada penekanan pada backward looking, stewardship, dan perilaku auditor. Bagi auditor, pelaporan Konservatisme akan menghindarkan dirinya dari potensi tuntutan hukum. Namun demikian, atas dasar standar akuntansi modern yang berorientasi future-oriented, yang bertujuan membantu investor dan stakeholder dalam pengambilan keputusan yang lebih relevan, akan meninggalkan prinsip Konservatisme tersebut.

Sehubungan dengan itu, prinsip Konservatisme tidak berlaku dalam IFRS. Laporan keuangan menurut IFRS seharusnya understandable, relevan, reliable, dan comparable, serta tanpa diikuti oleh bias konservatif. Hal ini juga dicerminkan dalam metode akuntansi yang dirumuskan oleh IASB. Misalnya, loss carry forwards menyebabkan adanya pengakuan piutang pajak yang ditangguhkan, development cost dikapitalisasi, dan kontrak jangka panjang diperlakukan berdasarkan metode prosentasi penyelesaian.

Contoh lain adalah perubahan Metode Penilaian atas Investasi Temporer dari Metode Lower Cost Or Market (LCOM) ke Metode Harga Wajar (Market). Perubahan tersebut bermakna, jika harga pasar naik, perusahaan sudah harus meningkatkan nilai investasinya, dan sudah mengakui keuntungan. Memang kalau dilihat dari sisi nilai Investasi, penilaian dengan nilai wajar memang sesuai dengan kondisi saat ini. Tetapi jika dilihat dari sisi keuntungan yang belum terjadi, karena memang tidak ada suatu transaksi penjualan, maka asas konservatisme dalam penilaian investasi sudah tidak berlaku lagi. Hal ini lah yang berarti menurunnya asas Konservatisme dalam Akuntansi. Itu salah satu contoh dampak perubahan SAK yang mengarah ke IFRS.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian tentang penerapan prinsip konservatisme pelaporan keuangan yang terkandung dalam standar akuntansi berbasis IFRS. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi beberapa alasan teoritis yang menyatakan bahwa penggunaan prinsip konservatisme pada PSAK berbasis IFRS semakin berkurang dibandingkan PSAK sebelumnya. Pernyataan bahwa penggunaan prinsip konservatisme pada PSAK berbasis IFRS yang semakin berkurang itu didasarkan pada beberapa kajian sebelum, namun belum ada penjelasan teoritis yang komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian studi kasus. Kasus yang diangkat terkait dengan dokumen Standar Akuntansi Keuangan hasil konvergensi yang telah ditetapkan sebagai standar penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dokumen tersebut akan diteliti tentang kandungan informasi yang mengatur metode pelaporan keuangan baik yang mendukung maupun tidak mendukung penerapan prinsip konservatisme. Unit analisis penelitian ini menggunakan unit analisis berupa perlakuan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Perlakuan akuntansi meliputi: 1) identifikasi; 2) pengukuran dan penilaian; 3) Pengakuan; dan 4) penyajian dan pengungkapan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk lembaran PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) hasil dari konvergensi dari IFRS. Data tersebut tersedia secara publik dalam bentuk buku PSAK tahun 2011. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi terhadap dokumen yang tersedia dengan mendasarkan pada unit analisis yang telah ditetapkan.

Metode analisis yang digunakan adalah content analysis. Yaitu analisis terhadap kandungan informasi standar yang terdiri atas

sejumlah paragraf. Adapun tahapan analysis yang dilakukan meliputi:

- 1) Melakukan identifikasi sejumlah pernyataan untuk digolongkan kepada dua komponen utama yakni komponen neraca dan komponen laba.
- 2) Mengidentifikasi sejumlah transaksi yang diatur dalam masing-masing standar
- 3) Menilai metode dan teknik pengukuran yang distandarkan
- 4) Menilai metode dan teknik penilaian yang distandarkan
- 5) Menilai metode dan teknik pengakuan yang distandarkan
- 6) Menilai metode dan teknik penyajian serta pengungkapan yang distandarkan
- 7) Atas dasar tahapan 1 sampai dengan 6, melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang dinilai dengan cara mereduksi kepada kecenderungan perlakuan akuntansi apakah mengarah pada dukungan atau penolakan terhadap penerapan konservatisme akuntansi .
- 8) Melakukan proses deduksi terhadap berbagai temuan yang diperoleh dengan mendasarkan pada teori normatif yang berlaku di bidang akuntansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Konvergensi IFRS di Indonesia

Alasan yang mendasarai mengapa Indonesia harus melakukan konvergensi IFRS adalah masalah kepentingan global agar dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di samping itu Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum, Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 secara prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan sebagai berikut: 1). *Strengthening Transparency and Accountability*; 2). *Enhancing Sound Regulation*; 3). *Promoting integrity in*

Financial Markets; 4). *Reinforcing International Cooperation*; 5). *Reforming International Financial Institutions*

Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia.

Pada periode 1973-1984, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah membentuk Komite Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia untuk menetapkan standar-standar akuntansi, yang kemudian dikenal dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Pada periode 1984-1994, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 (PAI 1984). Menjelang akhir 1994, Komite standar akuntansi memulai suatu revisi besar atas prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dengan mengumumkan pernyataan-pernyataan standar akuntansi tambahan dan menerbitkan interpretasi atas standar tersebut. Revisi tersebut menghasilkan 35 pernyataan standar akuntansi keuangan, yang sebagian besar harmonis dengan IAS yang dikeluarkan oleh IASB.

Pada periode 1994-2004, ada perubahan kiblat dari US GAAP ke IFRS, hal ini ditunjukkan Sejak tahun 1994, telah menjadi kebijakan dari Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk menggunakan *International Accounting Standards* sebagai dasar untuk membangun standar akuntansi keuangan Indonesia. Dan pada tahun 1995, IAI melakukan revisi besar untuk menerapkan standar-standar akuntansi baru, yang kebanyakan konsisten dengan IAS. Beberapa standar diadopsi dari US GAAP dan lainnya dibuat sendiri.

Pada periode 2006-2008, merupakan konvergensi IFRS Tahap 1, Sejak tahun 1995 sampai tahun 2010, buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terus direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru. Proses revisi dilakukan sebanyak enam

kali yakni pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 Juni 2006, 1 September 2007, dan versi 1 Juli 2009. Pada tahun 2006 dalam kongres IAI ke X di Jakarta ditetapkan bahwa konvergensi penuh IFRS akan diselesaikan pada tahun 2008. Target ketika itu adalah taat penuh dengan semua standar IFRS pada tahun 2008. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah. Sampai akhir tahun 2008 jumlah IFRS yang diadopsi baru mencapai 10 standar IFRS dari total 33 standar.

Road Map konvergensi IFRS

Sesuai dengan roadmap konvergensi PSAK ke IFRS (*International Financial Reporting Standart*) maka saat ini Indonesia

telah memasuki tahap persiapan akhir (2011) setelah sebelumnya melalui tahap adopsi (2008 – 2010). Hanya setahun saja IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menargetkan tahap persiapan akhir ini, karena setelah itu resmi per 1 Januari 2012 Indonesia menerapkan IFRS.

Di Indonesia juga masih terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang masih mengacu pada PSAK lama. Kemungkinan besar setelah konvergensi PSAK ke IFRS akan menyusul perubahan pada SAP. Tidak semua standar IFRS tersebut diatas dicontek habis dan dirubah menjadi PSAK, itulah mengapa IAI memilih konvergensi dari para *adaption* dan *adoption*. Sedikit gambaran saja untuk membedakan ketiga istilah tersebut saya jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Gambaran Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang masih mengacu pada PSAK lama

Perbedaan	Adaption	Convergence	Full Adoption
Arti harafiah Standart akuntansi	Adaptasi/Penyelarasan Membuat standar yang benar benar baru	Pertemuan pada suatu titik Membuat standar baru dengan mempertimbangkan keadaan yang berlaku	Adopsi/pemakaian Mentranslet standar menjadi standar baru
Contoh Negara	Indonesia sebelum IFRS	Indonesia setelah 2012	Australia, Hongkong

Mengutip pernyataan Prof Indra Wijaya (2009) dalam orasi ilmiah pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, beliau mengatakan: “Indonesia mengadopsi secara penuh seperti Australia sangat tidak mungkin, adopsi yang mungkin adalah Mengadopsi IFRS

berkarakteristik Indonesia yang lebih bersifat *taylor-made* namun memenuhi kebutuhan internasional serta dapat melepaskan diri dari tekanan dunia internasional”. Pernyataan itulah yang lebih tepat menjelaskan istilah konvergensi bagi Indonesia.

Berikut adalah Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia

Tabel 2. Roadmap konvergensi IFRS di Indonesia

Tahap Adopsi (2008 – 2010)	Tahap Persiapan Akhir (2011)	Tahap Implementasi (2012)
Adopsi seluruh IFRS ke PSAK	Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan	Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
Persiapan infrastruktur yang diperlukan	Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS	Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku		

Upaya IAI dalam menjalankan road map tersebut mulai tampak pada pengesahan

beberapa PSAK mulai tahun 2008 – 2011. Beberapa PSAK disahkan 23 Desember 2009 antara lain:

Tabel 3. road map pengesahan beberapa PSAK mulai tahun 2008 – 2011

No	Jenis	Isi	Tahun berlaku
1.	PSAK 13	Properti Investasi	2008
2.	PSAK 16	Aset Tetap	2008
3.	PSAK 30	Sewa	2008
4.	PSAK 19	Aset tidak berwujud	2010
5.	PSAK 14	Biaya Situs Web	2010
6.	PSAK 23	Pendapatan	2010
7.	PSAK 7	Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Berelasi	2010
8.	PSAK 22	Kombinasi Bisnis	2010
9.	PSAK 10	Transaksi Mata Uang Asing	2010
10.	PSAK 1	Penyajian Laporan Keuangan	2011
11.	PSAK 2	Laporan Arus Kas	2011
12.	PSAK 3	Laporan Keuangan Interim	2011
13.	PSAK 4	Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri	2011
14.	PSAK 5	Segmen Operasi	2011
15.	PSAK 7	Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi	2011
16.	PSAK 12	Bagian Partisipasi Dalam Ventura Bersama	2011
17.	PSAK 15	Investasi Pada Entitas Asosiasi	2011
18.	PSAK 19	Aset Tak Berwujud	2011
19.	PSAK 22	Kombinasi Bisnis	2011
20.	PSAK 23	Pendapatan	2011
21.	PSAK 25	Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi & Kesalahan	2011
22.	PSAK 48	Penurunan Nilai Aset	2011
23.	PSAK 57	Provisi, Liabilitas Kontijensi & Aset Kontijensi	2011
24.	PSAK 58	Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual & Operasi yang Dihentikan	2011

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Pertama, berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal

ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (*notes*) yang menyertai laporan keuangan (Chariri, 2009).

konservatisme akuntansi dalam IFRS

Beranjak kepada pengadopsian *International Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan merupakan wujud adanya penolakan dan kritik terhadap prinsip konservatisme akuntansi. Prinsip yang digunakan dalam IFRS adalah *fair value*, hal inilah yang menyebabkan tidak sejalan dengan konservatisme akuntansi. Prinsip *fair value* lebih menekankan pada relevansi, hal ini bersebrangan dengan prinsip konservatisme yang lebih menekankan pada reliabilitas.

Indonesia mengadopsi secara penuh IFRS mulai tahun 2012, dimana diwajibkan untuk menggunakan prinsip *fair value* dalam penyajian laporan keuangannya pada setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Safiq (2010) hal ini dikarenakan konservatisme akuntansi dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang menggunakan konservatisme akuntansi memiliki kualitas laba yang rendah (Penman dan Zhang dalam Safiq 2010).

Prinsip Konservatisme tidak berlaku dalam IFRS. Laporan keuangan menurut IFRS seharusnya *understandable*, relevan, *reliable*, dan *comparable*, serta tanpa diikuti oleh bias konservatif. Hal ini juga dicerminkan dalam metode akuntansi yang dirumuskan oleh IASB. Misalnya, *loss carry forwards*

menyebabkan adanya pengakuan piutang pajak yang ditangguhkan, *development cost* dikapitalisasi, dan kontrak jangka panjang diperlakukan berdasarkan metode prosentasi penyelesaian.

Contoh lain adalah perubahan Metode Penilaian atas Investasi Temporer dari Metode *Lower Cost Or Market* (LCOM) ke Metode Harga Wajar (*Market*). Perubahan tersebut bermakna, jika harga pasar naik, perusahaan sudah harus meningkatkan nilai investasinya, dan sudah mengakui keuntungan. Memang kalau dilihat dari sisi nilai Investasi, penilaian dengan nilai wajar memang sesuai dengan kondisi saat ini. Tetapi jika dilihat dari sisi keuntungan yang belum terjadi, karena memang tidak ada suatu transaksi penjualan, maka asas konservatisme dalam penilaian investasi sudah tidak berlaku lagi. Hal ini lah yang berarti menurunnya asas Konservatisme dalam Akuntansi. Itu salah satu contoh dampak perubahan SAK yang mengarah ke IFRS.

Berdasarkan analisis literatur, alasan tidak berlakunya prinsip konservatisme pada IFRS adalah adanya perbedaan kerangka konseptual antara SAK dengan IFRS pada setiap level: yaitu level 1: tujuan laporan keuangan, level 2: karakteristik kualitatif dan element laporan keuangan, dan level 3: Asumsi dasar, Prinsip dan kendala.

Tabel perbedaan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Level 1: Tujuan Laporan Keuangan

US GAAP	IFRS
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan informasi yang <u>berguna</u> untuk pengambilan keputusan <u>investasi</u> dan <u> Kredit</u>. Menyediakan informasi yang <u>berguna</u> untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian <u> arus kas</u> masa depan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi <u> sejumlah besar pengguna</u> dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat.

- Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan terhadap keduanya.

Tabel 5. Level 2: Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

US GAAP	IFRS
Relevan – terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai prediksi – membantu pengguna memprediksi hasil dari kejadian masa lalu, saat ini dan masa depan. • Nilai umpan balik – membantu pengguna mengkonfirmasi dan membetulkan nilai prediksi sebelumnya. • Tepat waktu – tersedia sebelum kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan 	Relevan – terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai prediksi • Nilai konfirmasi • Materialitas
Dapat dipercaya – terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Disajikan dengan jujur • Netral • Dapat diferivikasi 	Dapat dipercaya – terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Disajikan dengan jujur • Netral • Substansi mengungguli bentuk • Kehati-hatian (dimana ada ketidakpastian, kesalahan dalam menyediakn informasi dan menjamin adanya konservatisme. • Kelengkapan
Dapat dibandingkan Konsisten	Dapat dibandingkan

Tabel 6. Level 2: Element Laporan Keuangan

US GAAP	IFRS
Aset	Aset
Kewajiban	Kewajiban
Ekuitas	Ekuitas
Investasi pemilik	Pemeliharaan modal (diperoleh dari revaluasi asset dan kewajiban)
Distribusi kepada pemilik	Laba (Pendapatan dan keuntungan)
Laba komprehensif	Beban (beban dan kerugian)
Pendapatan	
Keuntungan	
Beban	
Kerugian	

Tabel 7. Level 3: Pengakuan dan pengukuran – Asumsi dasar

US GAAP	IFRS
1. Kelangsungan usaha	1. Kelangsungan usaha
2. Entitas ekonomi	2. Basis akrual
3. Unit moneter	
4. Periodisitas	

Tabel 8. Level 3: Pengakuan dan pengukuran – Prinsip

US GAAP	IFRS
1. Biaya historis	1. Biaya historis
2. Pengakuan pendapatan	2. Biaya sekarang (apa yang harus dibayar hari ini untuk mendapatkan aset. Ini sering diperoleh dalam penilaian yang sama dengan nilai wajar)
3. Kesesuaian	3. Nilai realisasi (jumlah kas yang dapat diperoleh saat ini jika aset dilepas)
4. Pengungkapan penuh	4. Nilai wajar
	5. Pengakuan pendapatan
	6. Pengakuan beban
	7. Pengungkapan penuh

Tabel 9. Level 3: Pengakuan dan pengukuran – Kendala

US GAAP	IFRS
1. Biaya dan manfaat	Keseimbangan antara biaya dan manfaat
2. Materialitas	Tepat waktu
3. Praktik Industri	Keseimbangan antara karakteristik kualitatif
4. Konservatisme	

Konservatisme didefinisikan sebagai ‘kecenderungan akuntan untuk membutuhkan verifikasi pada tingkat yang lebih tinggi untuk keuntungan daripada kerugian. Definisi resmi Konservatisme dari FASB yakni ‘reaksi kehati-hatian atas ketidakpastian untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian tersebut dan risiko yang melekat dipertimbangkan secara memadai’.

Namun dalam penerapan aturan IFRS tertentu, prinsip akuntansi konservatisme masih dipertahankan pada berbagai area meskipun dalam standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) menyiratkan bahwa prinsip konservatisme tidak lagi diterapkan. Ada beberapa contoh area yang prinsip konservatisme akuntansi kemungkinan masih dipertahankan, misalnya :

1. Kompensasi kerugian menyebabkan pengakuan piutang pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi **apabila besar kemungkinan** laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi. Kriteria probabilitas

(kemungkinan) merupakan kriteria kualitatif yang bersifat subjektif dimana dengan adanya kriteria *subjective judgement* ini terbuka peluang untuk menerapkan konservatisme.

2. Kapitalisasi biaya pengembangan. Salah satu syarat Aset tak berwujud yang timbul seperti biaya pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada proyek internal) diakui apabila memenuhi bagaimana aset tak berwujud tersebut akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan. Dalam sebuah perusahaan memperbarui estimasi mengenai arus kas masa depan dari biaya pengembangan yang dikapitalisasinya, mungkin ada “efek sementara” konservatisme yang mengarah pada penciptaan cadangan tersembunyi yang kemudian dapat dibalik kembali (*Reversed*).

Intinya, Prinsip “konservatisme” tetap ada dalam penerapan IFRS. Prinsip konservatisme berdasarkan IFRS diterapkan dalam cara konservatisme sementara (perubahan estimasi akuntansi yang

sementara seperti *understated* aset bersih melalui penciptaan cadangan tersembunyi yang kemudian dapat dibalik) daripada cara konservatisme konsisten (penilaian aset bersih yang terlalu rendah). Hal ini berarti penekanan yang lebih rendah dari konservatisme yang konsisten pada implementasi IFRS digantikan oleh penekanan pada konservatisme sementara yang lebih besar.

Hal ini memiliki dampak bagi pengguna laporan keuangan karena efek penerapan prinsip konservatisme sementara (perkiraan akuntansi diubah) memiliki tingkat yang lebih kompleks pada pengukuran laba dibandingkan dengan aplikasi konservatisme konsisten. Ketika prinsip konservatisme diterapkan dalam cara sementara, perusahaan memperlakukan beberapa kegiatan secara konservatif (item-item yang tidak memenuhi persyaratan kriteria pengakuan atau probabilitas lain), sementara yang lain akan diperhitungkan sesuai dengan IFRS. (item-item yang memenuhi persyaratan probabilitas dan kriteria pengakuan lainnya). Perlakuan prinsip akuntansi campuran ini juga akan memiliki dampak bagi pengguna laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konservatisme akuntansi tetap “bermain” atas pengimplementasian IFRS. Standar-standar IASB (IFRS) tidak merujuk secara eksplisit prinsip penerapan konservatisme, karena memang tidak sesuai dengan kerangka teori IFRS. Namun, konservatisme tidak hilang hanya karena tidak “ditekankan” dalam standar. Dengan adanya ketidakpastian maka akan tetap ada penerapan konservatisme dalam penyajian laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

ANDRE, Paul , 2011, *Accounting Conservatism in Europe and the Impact of Mandatory IFR Adoption:*

A Look at Legal Incentives, Corporate Governance, Enforcement Prior Accounting Traditions and Tax Book Conformity , ESSEC KPMG Financial Reporting Centre

Ball, R., Robin A., and Wu Y., 2000. Incentives Versus Standard: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries, and Implication for Acceptance of IAS. Working Paper, University of Chicago.

Ball, R., Kothari SP., and Robin A., 2002. The Effect of International Institution Factors on Properties of Accounting Earnings. *Journal of Accounting and Economics* 29:1-51.

Basu, Sudipta, 1997. The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness of Earnings. *Journal of Accounting and Economics*, 24: 3-37.

Beaver WH., and S. Ryan, 2000. Biases and Lags In Book Value and Their Effect on Adability of The Book-To-Market Ratio to Predict Book Return on Equity. *Journal of Accounting Research* 38 (1):127-148

Financial Accounting Standard Board (FASB), 1978. *Statement of Financial Accounting Concepts, No. 1*, Objective of Financial Reporting by Business Enterprises, Stamford, CT: FASB

FASB, 1980, *Statement of Financial Accounting Concepts, No. 2*, Qualitative Characteristics of Financial Information, Stamford, CT: FASB

Hendriksen ES., and Van Breda MF., 1992. *Accounting Theory*, 5th Edition, Irwin, Homewood, Boston.

Hellman, Niclas 2007 , *Accounting conservatism under IFRS*, Stockholm

- School of Economics, Department of Accounting and Managerial Finance, May 2007
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- J.C. Hille, 2011, Accounting Conservatism: *The association between bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and accounting conservatism, the effect on the cost of debt and the influence of the implementation of IFRS in 2005*, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM s Thesis
- Juanda, Ahmad, 2006, *Pengaruh Risiko Litigasi dan Tipe Strategi terhadap Hubungan antara Konflik Kepentingan Ivestor Vs Kreditor dan konservatisme pelaporan keuangan*. Disertasi FE-UGM
- Kam, Vernon, 1990. *Accounting Theory*. New York: John Wiley & Sons.
- Penman,S., and X. Zhang, 2002. *Accounting Conservatism, Quality of Earnings, and Stock Returns*. *The Accounting Review*, 77 (2): 237 –264.
- Rahmany, Fuad (2009), *makalah Seminar Nasional Akuntansi “Tiga pilar Standar Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia di kota Malang pada tanggal 17-18 Juli 2009*
- Sari, Dahlia, 2004. Hubungan Antara Konservatisme Akuntansi Dengan Konflik *Bondholder-Shareholder* Seputar Kebijakan Dividen dan Peringkat Obligasi Perusahaan. SNA IV , Denpasar
- Sterling RR., 1967. Conservatism: The Fundamental Principle of Valuation in Traditional Accounting. *Abacus*, June:109-132.
- Watts RL., 2003. Conservatism In Accounting Part I : Explanation and Implication. *Accounting Horizons*, September 17 No 3, 207-221.
- Watts RL., 2003. Conservatism In Accounting Part II: Evidence and Research Opportunities. *Accounting Horizons*, Desember Vol. 17 No. 4, 287-302.